

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perekmbangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok

## Latar Belakang

Laju inflasi Indonesia memiliki karakteristik yang cukup bergejolak di mana tidak hanya dipengaruhi oleh sisi permintaan, melainkan juga dari sisi penawaran dan faktor lain yang bersifat tidak terduga atau *shock*. Faktor dari sisi penawaran berkaitan dengan biaya produksi, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi barang maupun kebijakan pemerintah terkait impor ataupun harga komoditas strategis, seperti bahan bakar dan komoditas energi lainnya yang sering kali menjadi pemicu utama terjadinya gejolak harga.

Karakteristik inflasi Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor kejutan (*shocks*). Faktor kejutan tersebut dapat berupa gangguan produksi karena bencana alam seperti banjir dan musim kering yang berkepanjangan yang banyak memengaruhi inflasi pada kelompok bahan makanan (*volatile food*). Disamping itu, *shocks* juga dapat berupa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik yang memberikan dampak pada inflasi kelompok komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered prices*). Dengan kondisi tersebut, inflasi tidak dapat hanya direspon oleh kebijakan moneter yang merupakan tugas bank sentral. Untuk menurunkan inflasi pada level yang rendah dan stabil perlu dukungan dari Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi gangguan (*shocks*) dari sisi penawaran (*supply*), termasuk terkait gejolak harga pangan dan harga yang diatur pemerintah.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang rendah dan stabil akan berdampak positif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan terjaganya daya beli. Inflasi yang rendah dan stabil juga kondusif bagi para pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Wujud dukungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu terhadap Upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi adalah dengan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/124/KPTS/U.06/2024 Tanggal 26 Januari 2024 tentang Tim dan Sekretariat Pengendalian Indlasi Daerah Kabupaten Pringsewu.

Keberadaan TPID Kabupaten Pringsewu diharapkan mampu berperan dalam pengendalian inflasi daerah. Inisiatif pembentukan TPID oleh pemerintah yang dimulai sejak 2008 memperoleh dukungan yang positif dari berbagai kalangan, khususnya daerah dengan turut membentuk TPID didaerahnya. Hal ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran daerah terhadap implikasi inflasi bagi kegiatan pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Besarnya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu untuk turut berpartisipasi menjaga stabilitas harga

melatarbelakangi terbentuknya TPID Kabupaten Pringsewu. Inisiatif pembentukan TPID dimulai sejak 2017 dengan dukungan dari berbagai kalangan, khususnya di daerah. Sampai dengan tahun 2022 tercatat 527 TPID di 37 Provinsi, yang mencerminkan semakin tingginya kesadaran daerah terhadap implikasi inflasi bagi kegiatan pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.

◦ **Dasar Hukum**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah
3. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor B/126/ KPT/1.06/2025 Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Tim dan Sekretariat Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pringsewu

▪ **Tujuan TPID Kabupaten Pringsewu**

4. Menurunkan laju Inflasi daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan Inflasi Nasional yang rendah dan stabil;
5. Meningkatkan kerjasama dan komitmen kelembagaan di daerah dalam Pengendalian Inflasi di Daerah.
6. Memantau dan mengendalikan Inflasi di Daerah dengan Rekomendasi langkah-langkah yang dapat di implemetasikan.

◦ **Susunan TPID Kabupaten Pringsewu**

- |      |              |   |  |
|------|--------------|---|--|
| I.   | Ketua        | : | Penjabat Bupati Pringsewu.   |
| II.  | Wakil Ketua  | : | Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung.                                    |
| III. | Ketua Harian | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.                                       |
| III. | Sekretaris   | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu. |

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu;
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu;
  3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu;
  4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu;
  5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu;
  6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu;
  7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu;
  8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu;
  9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu;
  10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu;
  11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung;
  12. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu;
  13. Kepala Perum Bulog Divisi Regional Lampung;
  14. Pimpinan PT. Pertamina (Sales Eksekutif LPG Rayon III) Lampung;
  15. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
  16. Sekretaris Dinas pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu;
  17. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu;
  18. Kepala Bidang Perdagangan dan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu
  19. Kepala Bidang Budidaya dan Tangkap pada Dinas Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu;
  20. Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu;
  21. Eka Yulia Fitriana, S.E. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
  22. Yuli Yanti, S.E., M.M. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
  23. Adhian Restyadi, S.T. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
  24. Mainy, S.E., M.M. Perencanaan Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  25. Lucky Adrian, SP., Msi. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda pada Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) pada Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu;
  26. Agustia Rini Nofianti, S.E., M.M. Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Pringsewu;
  27. Mirza Nawawi, S.H. Fungsional Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu;
  28. Firdausi, S.T. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu;
- IV. Anggota :

## SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Ketua : Aprianti, S.Pd. Staf Non ASN pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
1. Ricka Astriana, A.Md. Staf Non ASN pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
- Nur Ailiyawati, S.IP. Staf Non ASN pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.
- II. Anggota : Kismiati, S.E. Staf Non ASN pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.
2. Iwan Muis Staf Non ASN pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
- 5 Rudi Pramono Staf Non ASN pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.

## PERKEMBANGAN HARGA BAHAN POKOK DI KABUPATEN PRINGSEWU

### 2.1. Perkembangan Inflasi Tahun 2025

Inflasi berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Penyebab inflasi di Indonesia terjadi karena adanya tekanan dari sisi permintaan (*Demand Pull Inflation*) maupun dari sisi penawaran (*Cost Push Inflation*). Selain itu, laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti meningkatnya kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan permintaan agregat yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran agregat karena adanya kendala struktural perekonomian.

Kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan juga ikut mempengaruhi kenaikan harga barang dan jasa seperti BBM, listrik, air minum dan rokok serta menaikkan upah minimum tenaga kerja swasta dan gaji pegawai negeri diperkirakan memberikan tambahan inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen). Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok barang/ jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.

Pada dasarnya, tingkat inflasi yang dihitung dari persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan bahan dasar utama IHK adalah survei pemilihan mitra kota (Sister City) untuk kabupaten/ kota di luar kota SBH (Survey Biaya Hidup). Oleh karena itu, agar kabupaten/kota yang ingin menghitung inflasi untuk wilayahnya

masing-masing membutuhkan data hasil SBH tersebut. Melalui pelaksanaan SBH diperoleh paket komoditas dan diagram timbang (bobot) untuk Inflasi berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Penyebab inflasi di Indonesia terjadi karena adanya tekanan dari sisi permintaan (*Demand Pull Inflation*) maupun dari sisi penawaran (*Cost Push Inflation*). Selain itu, laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti meningkatnya kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan permintaan agregat yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran agregat karena adanya kendala struktural perekonomian.

Pelaksanaan SBH tersebut selama ini hanya dilakukan 5 (lima) tahun sekali yang merupakan tahun dasar IHK. Untuk Provinsi Lampung hanya dilakukan di 2 (dua) kota/kabupaten, yaitu Bandar Lampung, dan Metro. Sedangkan untuk Kabupaten Pringsewu belum tersedia data tersebut. Sehingga dibutuhkan penghitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai suatu metode sederhana untuk mengukur perubahan harga di suatu wilayah dengan menggunakan metode penghitungan yang sama dengan metode penghitungan Indeks Harga Konsumen perhitungan IHK, sedangkan data harga dan tarif diperoleh melalui monitoring data harga eceran rutin bulanan, dua mingguan, dan mingguan. Sedangkan untuk Kabupaten Pringsewu belum tersedia data tersebut. Sehingga dibutuhkan penghitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai suatu metode sederhana untuk mengukur perubahan harga di suatu wilayah dengan menggunakan metode penghitungan yang sama dengan metode penghitungan Indeks Harga Konsumen.

## **B. Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Pringsewu**

IPH merupakan suatu metode sederhana untuk mengukur perubahan harga di suatu wilayah dengan menggunakan metode penghitungan yang sama dengan metode penghitungan Indeks Harga Konsumen. IPH dapat digunakan sebagai pembandingan terhadap IHK BPS khususnya untuk kelompok Bahan Makanan. IPH mengukur perubahan harga kumulatif 20 bahan kebutuhan pokok. Komoditas terpilihnya dibatasi hanya yang bisa dikendalikan dalam jangka pendek. Dalam metode penghitungannya, IPH mempertimbangkan bobot komoditas sebagai faktor penimbang. IPH dihitung sebagai hasil perbandingan kumulatif rata-rata harga pada minggu ke-1 sampai minggu ke- $t$  bulan ke- $m$  (bulan berjalan) dengan kumulatif rata-rata harga pada bulan sebelumnya (kumulatif minggu 1 - minggu akhir). Pada komoditas-komoditas tertentu (misal, beras, telur, cabai, rokok), yang memiliki bobot penimbang besar, perubahan harga yang relatif kecil, memberikan dampak andil IPH yang signifikan terhadap IPH total suatu daerah.

Kabupaten Pringsewu sampai saat ini merupakan daerah yang belum menjadi sampel

pengukuran inflasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik / daerah Non IHK, berkenaan dengan hal tersebut pendekatan yang dijadikan tolak ukur pengukuran inflasi melalui metode pengukuran Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proxy inflasi

### **Indeks Perkembangan Harga (IPH)**

**Januari - Maret 2025**

**Tabel 1**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>IPH</b>		
		<b>JANUARI</b>	<b>FEBRUARI</b>	<b>MARET</b>
1	Minggu Ke 1	-0,69	<b>-0,85</b>	<b>0,22</b>
2	Minggu ke 2	-0,68	<b>-0,73</b>	
3	Minggu ke 3	-0,62	<b>-0,62</b>	
4	Minggu ke 4	<b>Tidak ada</b>	<b>-0,55</b>	

**Sumber data BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2025**

#### **2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.**

Pada dasarnya, tingkat inflasi yang dihitung dari persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan bahan dasar utama IHK adalah survei pemilihan mitra kota (Sister City) untuk Kabupaten/Kota di luar kota SBH (Survey Biaya Hidup). Oleh karena itu, agar Kabupaten/Kota yang ingin menghitung inflasi untuk wilayahnya masing-masing membutuhkan data hasil SBH tersebut. Melalui pelaksanaan SBH diperoleh paket komoditas dan diagram timbang (bobot) untuk perhitungan IHK, sedangkan data harga dan tarif diperoleh melalui monitoring data harga eceran rutin bulanan, dua mingguan, dan mingguan.

Pelaksanaan SBH tersebut selama ini hanya dilakukan 5 (lima) tahun sekali yang merupakan tahun dasar IHK. Untuk Provinsi Lampung hanya dilakukan di 4 (empat) Kabupaten/Kota, yaitu Bandar Lampung, Metro, Mesuji dan Lampung Timur. Sedangkan untuk Kabupaten Pringsewu belum tersedia data tersebut. Sehingga dibutuhkan penghitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai suatu metode sederhana untuk mengukur perubahan harga di suatu wilayah dengan menggunakan metode penghitungan yang sama dengan metode penghitungan Indeks Harga Konsumen

## Perkembangan Harga Komoditas Pangan, Bulan Januari Tahun 2025

### Perkembangan Harga Komoditas Pangan, Bulan Januari 2025

Tabel 2

KOMODITAS	Minggu ke / Harga rata-rata (Rp)				
	1	2	3	4	Rata <sup>2</sup>
Beras Kualitas Medium	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Beras Kualitas Super	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gula Pasir	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Cabe Besar	22.500	23.800	25.000	28.000	24.825
Cabe Rawit Merah	28.000	31.000	33.400	40.000	33.199
Cabe Rawit Ijo	24.000	25.800	27.400	31.000	27.050
Bawang Merah	30.000	30.000	29.200	27.600	29.200
Bawang Putih	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Minyak Goreng Curah	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
Minyak Goreng Kemasan	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Daging Sapi	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Daging Ayam	35.000	34.000	34.000	29.600	33.150
Telur Ayam	26.000	26.00	26.00	26.00	26.00

### Sumber data SIKP Tahun 2025

Berdasarkan data perkembangan harga bulan Januari tahun 2025 yaitu:

#### Komoditas dengan Harga Stabil

Komoditas ini menunjukkan **harga yang tetap atau hanya sedikit berubah** selama 4 minggu:

- A
- **Beras Kualitas Medium:** Stabil di Rp12.500.
  - **Beras Kualitas Super:** Stabil di Rp15.000.
  - **Gula Pasir:** Tidak mengalami perubahan, tetap Rp17.000.
  - **Bawang Putih:** Harga tetap di Rp32.000.
  - **Minyak Goreng (Curah & Kemasan):** Harga masing-masing tetap di Rp16.000 dan Rp19.000.
  - **Daging Sapi & Daging Ayam:** Harga tetap di Rp133.000 dan Rp35.500.
  - **Telur Ayam:** Sedikit fluktuasi, tetapi rata-rata di Rp26.000
- Komoditas ini menunjukkan **stabilitas harga**, yang bisa mengindikasikan ketersediaan pasokan yang baik atau permintaan yang tetap

## Komoditas dengan Fluktuasi Harga

Beberapa komoditas mengalami **kenaikan dan penurunan harga** dalam periode 4 minggu:

- **Cabe Besar**: Harga naik dari Rp22.000 ke Rp25.000 dengan rata-rata Rp24.825.

- **Cabe Rawit Merah**: Naik dari Rp31.000 ke Rp33.000, rata-rata Rp32.250.

- **Cabe Rawit Hijau**: Fluktuasi lebih tajam, dari Rp27.000 ke Rp30.000, rata-rata Rp29.050.

- **Bawang Merah**: Mengalami kenaikan bertahap dari Rp28.000 ke Rp30.000, rata-rata Rp29.200.

### □ Kesimpulan:

- **Cabe dan bawang merah** sering mengalami **fluktuasi harga** karena dipengaruhi faktor musim, cuaca, dan distribusi.

- **Potensi dampak**: Kenaikan harga cabai dan bawang bisa berpengaruh pada inflasi pangan karena keduanya adalah bahan pokok masakan sehari-hari

## 2. Faktor yang mempengaruhi

Ada beberapa factor yang mempengaruhi kenaikan harga beras, gula pasir, dan minyak goreng disebabkan oleh dkurangnya lancarnya arus istribus dan kurangnya control dari pemerintah dan peningkatan harga cabai dan bawang merah di pengaruhi oleh factor cuaca dan gagal panen dan permintaan yang tinggi sedangkan berkurangnya pasokan di pasar..

## 3. Implikasi & Rekomendasi

**Menjaga Stabilitas Harga**: Pemerintah dan pedagang dapat

1. **memantau distribusi dan stok komoditas penting**, terutama untuk cabai dan bawang merah. **Antisipasi Fluktuasi Musiman**:

Komoditas seperti cabai sering mengalami kenaikan harga, sehingga

2. **peningkatan cadangan atau diversifikasi sumber pasokan** bisa membantu menekan harga.

**Kebijakan Stabilisasi Pasar**: Jika tren kenaikan harga cabai dan

3. bawang terus terjadi, mungkin diperlukan **intervensi pemerintah** dalam bentuk subsidi atau operasi pasar

## 4 Kesimpulan Akhir

1. **Sebagian besar komoditas pangan stabil**, terutama beras, minyak goreng, dan gula.

2. **Komoditas seperti cabai dan bawang merah mengalami fluktuasi**, yang bisa berdampak pada inflasi pangan.

3. **Penting untuk mengantisipasi faktor musiman** agar harga tetap terkendali, terutama untuk komoditas yang sering berfluktuasi

1. Perkembangan harga bulan Februari Tahun 2025

## 3 (Tiga) Komoditas Utama Penyumbang IPH di Kab.Pringsewu, Januari 2025

Tabel 3

Minggu  
Ke IPH Komoditas Utama Penyumbang IPH



1	-0,69	Daging Ayam RAs (-0,6402), Beras (-0,3001), Bawang Merah (-0,0436)
2	-0,68	Daging ayam Ras (-0,4606), Beras (-0,3001), Bawang Merah (0,04367)
3	-0,62	Daging Ayam RAs ( -0,6911), Beras ( -0,3001), Bawang Merah ( -0,0614)
4		Tidak ada data
5	00,95	Daging ayam ras ( -1,2801), Beras (-0,3001), Bawang Merah (-0,1087)

## **Perkembangan Harga Komoditas Pangan, Bulan Februari Tahun 2025**

### **Perkembangan Harga Komoditas Pangan, Februari 2025**

**Tabel 4**

<b>KOMODITAS</b>	<b>Minggu ke / Harga rata-rata (Rp)</b>				
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Rata<sup>2</sup></b>
Beras Kualitas Medium	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Beras Kualitas Super	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Gula Pasir	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Cabe Besar	40.000	42.200	45.800	46.000	43.600
Cabe Rawit Merah	32.600	35.200	39.400	40.000	36.800
Cabe Rawit Ijo	27.000	26.600	25.000	25.000	25.900
Bawang Merah	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Bawang Putih	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Minyak Goreng Curah	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Minyak Goreng Kemasan	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Daging Sapi	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Daging Ayam	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Telur Ayam	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

### **Sumber data SIKP Tahun 2025**

Berdasarkan data perkembangan harga bulan Februari Tahun 2025 dapat di sampaikan hal - hal sebagai berikut

#### **1 Stabalisasi harga**

Beberapa komoditas memiliki harga yang stabil sepanjang Februari 2025

- Ø **Beras Kualitas Medium (Rp 15.000/kg)**
- Ø **Beras Kualitas Super (Rp 12.500/kg)**
- Ø **Gula Pasir (Rp 18.000/kg)**
- Ø **Bawang Merah (Rp 25.000/kg)**
- Ø **Bawang Putih (Rp 32.000/kg)**
- Ø **Minyak Goreng Curah (Rp 19.000/kg)**
- Ø **Minyak Goreng Kemasan (Rp 16.000/kg)**
- Ø **Daging Sapi (Rp 133.000/kg)**
- Ø **Daging Ayam (Rp 28.000/kg)**
- Ø **Telur Ayam (Rp 25.000/kg)**

Ini menunjukkan bahwa pasokan dan permintaan untuk komoditas ini relatif stabil, sehingga harga tidak mengalami fluktuasi

## 2. Komoditas dengan Tren Kenaikan Harga

- Ø **Cabe Besar:** dari Rp 40.000 naik ke Rp 46.000 (kenaikan 15%)
  - Ø **Cabe Rawit Merah:** dari Rp 32.600 naik ke Rp 40.000 (kenaikan 22,7%)
- Peningkatan harga Cabai di pengaruhi oleh faktor cuaca yang ekstrim dan berkurangnya pasokan di pasar.

**Potensi dampak:** Kenaikan harga cabai dan bawang bisa berpengaruh pada inflasi pangan karena keduanya adalah bahan pokok masakan sehari-hari

## 3 Komoditas dengan Tren Penurunan Harga

- Ø **Cabe Rawit Hijau:** dari Rp 27.000 turun ke Rp 25.000 (penurunan 7,4%)
- Penurunan harga ini disebabkan oleh peningkatan pasokan di pasaran dipasar dan lancarnya arus distribusiatau.

## 4 Kesimpulan

- Ø Sebagian besar komoditas pangan mengalami harga yang stabil.
- Ø Hanya komoditas cabe yang menunjukkan volatilitas harga, dengan cabe besar dan cabe rawit merah mengalami kenaikan cukup signifikan, sementara cabe rawit hijau mengalami sedikit penurunan.
- Ø Perlu diperhatikan faktor cuaca dan distribusi yang mungkin memengaruhi harga komoditas tertentu di bulan-bulan mendatang

# 3 (Tiga) Komoditas Utama Penyumbang IPH di Kab.Pringsewu,Februari 2025

**Tabel 5**

<b>Minggu Ke</b>	<b>IPH</b>	<b>Komoditas Utama Penyumbang IPH</b>
1	-0,85	Daaging ayam ras ( -1,4436)(, Bawang Merah (-0,1178), Minyak Goreng (-0,0027)
2	-0,73	Daging ayam ras (-1,4436), Bawang Merah ( -0,1304), Minyak Goreng (-0,0027)
3	-0,62	Daging ayam ras ( -0,1,4436), Bawang Merah (-0,1673), Minyak Goreng ( -0,002&)
4	-0,55	Daging Ayam Ras (-1,4436), Bawang Merah (-0,18), Minyak Goreng ( -0,0027)

## 2.3. Perkembangan Harga Komoditas Pangan, Bulan Maret Tahun 2025

### Perkembangan Harga Komoditas Pangan, Februari 2025

**Tabel 6**

KOMODITAS	Minggu ke / Harga rata-rata (Rp)				
	1	2	3	4	Rata <sup>2</sup>
Beras Kualitas Medium	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Beras Kualitas Super	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gula Pasir	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Cabe Besar	31.000	30.400	30.000	30.000	30.350
Cabe Rawit Merah	46.400	47.000	47.000	47.000	46.850
Cabe Rawit Ijo	40.000	40.400	41.000	41.000	40.600
Bawang Merah	25.000	25.600	27.000	28.000	26.400
Bawang Putih	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Minyak Goreng Curah	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Minyak Goreng Kemasan	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Daging Sapi	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Daging Ayam	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Telur Ayam	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

### Sumber data SIKP Tahun 2025

#### 1 Stabilisasi harga

Beberapa komoditas memiliki harga yang stabil sepanjang Maret 2025

- Ø Beras Medium Rp. 12.500
- Ø Beras Premium Rp. 15.000
- Ø Gula Pasir curah Rp. 17.000
- Ø Minyak Goreng kemasan Rp. 19.000
- Ø Daging Sapi Rp. 134.000
- Ø Bawang Putih Rp. 32.000
- Ø Daging Ayam Rp. 28.000
- Ø Telur Ayam ras Rp. 26.000
- Ø Minyak goreng curah Rp. 16.000

#### 2. Komoditas dengan Tren Kenaikan Harga

- Ø Cabe rawit merah Rp. 46.400 naik Rp 47.000
- Ø Cabe rawit hijau minggu pertama Rp. 40.000, naik Rp. 41.000
- Ø Bawang merah Rp. 25.000 naik Rp. 28.000

Peningkatan harga cabe dan bawang merah disebabkan oleh banyaknya permintaan di pasar menjelang hari Raya Idul Fitri sedangkan pasokan di pedagang yang berkurang di dorong oleh factor curah hujan yang tinggi

**3. Komoditas dengan penurunan Harga**

- Ø Cabe Merah besar Rp. 31.000 turun Rp. 30.000

Penurunan Cabe merah di dorong oleh ketersediaan pasokan pedagang yang melimpah di sebabkan masuknya masa panen cabe merah

**4. Keimpulan**

- Ø Sebagian besar komoditas pangan mengalami harga yang stabil.
- Ø Hanya komoditas cabe yang menunjukkan volatilitas harga, dengan cabe rawit hijau dan cabe rawit merah mengalami kenaikan cukup signifikan, sementara cabe merah mengalami sedikit penurunan.
- Ø Perlu diperhatikan faktor cuaca dan distribusi yang mungkin memengaruhi harga komoditas tertentu di bulan-bulan mendatang

### **3(Tiga) Komoditas Utama Penyumbang IPH di Kab.Pringsewu,Februari 2025**

**Tabel 5**

<b>Minggu Ke</b>	<b>IPH</b>	<b>Komoditas Utama Penyumbang IPH</b>
1	0,4	Cabai rawit (0,247), Daging sapi (0,1326), Cabai Merah (0,9217)

**3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.**

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**

Kebijakan pengendalian inflasi di Pringsewu difokuskan untuk menjaga ketersediaan pasokan, kestabilan harga, mendukung kelancaran distribusi sekaligus meminimalkan gangguan yang dapat menghambat pasokan dan distribusi untuk mendukung pencapaian target inflasi sebesar 2,5%. TPID Kabupaten Pringsewu membuat laporan ini untuk menginformasikan strategi pengendalian inflasi 4K yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan stok, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif di Kabupaten Pringsewu

#### **4.1. KETERJANGKAUAN HARGA**

TPID Kabupaten Pringsewu fokus pada program stabilisasi harga dan mengelola permintaan diantaranya melalui kegiatan pangan murah, bahan baku murah untuk UMKM, monitoring harga di lapangan serta kerjasama untuk pangan murah bersubsidi

Monitoring Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Komoditas Pangan.

- Untuk tetap menjaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditas pangan, untuk itu Tim Satgas Pangan Kabupaten Pringsewu bersama Bapak Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu melakukan monitoring ke beberapa pasar pemerintah yang dilaksanakan dari tanggal 2021 dan 25 Februari 2025, Pasar Sukoharjo, Pagelaran, Pasar Pagelaran dan Pasar Gadingrejo
- Dokumentasi monitoring ketersediaan dan keterjangkauan harga pasar pagelaran.
  - Pada tanggal 26 Februari 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Gerakan Pangan Murah bersubsidi di Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu di hadir oleh Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu ibu Umi Lalila dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu bapak Andi Purwanto

## **GERAKAN PANGAN MURAH**

**Dikelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu**

**Tanggal 26 Februari 2025**

**Tabel**

<b>NO</b>	<b>KOMODITAS</b>	<b>KUANTUM (KG/LITER/ BGKS) Kelurahan Pringsewu Selatan</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA JUAL KE MASYARAKAT (Rp)</b>
1	BERAS MEDIUM	3000	kg	10.000/kg
2	MINYAK KITA PREMIUM	1200	liter	15.000/liter
3	GULA	480	kg	15.000/kg
4	TERIGU	500	kg	8.000
5	BAWANG MERAH	100	bungkus	10.000/Bks
6	BAWAH PUTIH			
7	CABE MERAH	100	bungkus	10.000/bks
8	CABE RAWIT			
9	TELUR	180	bungkus	25.000/bks

Sumber data Dinas Ketahanan pangan

- Pada tanggal 28 Februari 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Gerakan Pangan Murah bersubsidi di Pekon Mataram Kecamatan Gadingrejo hadir oleh Kepala Dinas Ketahanan Kabupaten Pringsewu.

## **GERAKAN PANGAN MURAH**

**DIKelurahan Pringsrewu Selatan Kecamatan Pringsewu**

**Tanggal 26 Februari 2025**

1.

**Tabel**

NO	KOMODITAS	KUANTUM (KG/LITER/ BGKS) Pekon Mataram	SATUAN	HARGA JUAL KE MASYARAKAT (Rp)	Harga di Pasar	Selisih harga
1	BERAS MEDIUM	3.000	Kg	10.000/kg	12.500	2500
2	MINYAK KITA PREMIUM	1.200	Liter	15.000/liter	17.000	2000
3	GULA	600	Kg	15.000/kg	18.000	3.000
4	TERIGU	1.000	Kg	8.000	12.000	4.000
5	BAWANG MERAH	200	Bungkus	10.000/Bks	8.000	2.000
6	BAWAH PUTIH				8.000	2.000
7	CABE MERAH	200	Bungkus	10.000/bks	8.000	2.000
8	CABE RAWIT				8.000	2.000
9	TELUR	237	Bungkus	25.000/bks	28.000	3.000

◦ **Sumber data dari Dinas Ketahanan Pangan**

- Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pringsewu bersama Forkopinda melaksanakan monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok pangan di Pasar banyumas Kecamatan Pringsewu pada tanggal 10 Maret 2025 yang di pimpin oleh Bupati Pringsewu Hi. Riyanto Pamungkas, adanya peningkatan jarga pada komoditas Bawang Merah, telur ayam ras, daging ayam ras dan beras peningkatan harga didorong oleh banyaknya permintaan di pasar sedangkan berkurangnya pasokan di pedagang
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu pada tanggal 18 Maret 2025, melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah di Pekon Waringinsari Baarat Kecamatan sukoharjo yang di hadiri oleh Wakil Bupati Pringsewi ibu Umi Laila dan OPD terekait, adapun komoditas dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah bersubsidi yaitu Beras Medium, Beras Premium, Gula Pasir, Tepung terigu, Minyak goreng, TELur Ayam, Cabe Merah, Cabe rawit, Bawang Merah dan Bawang Putih,

**GERAKAN PANGAN MURAH  
DI PEKON WARINGSARI BARAT DAN PEKON PAGELARAN  
Tanggal 18 CZM 20 MARET 2025**

NO	KOMODITAS	KUANTUM (KG/LITER/ BGKS) Pekon waringinsari barat	SAT	HARGA JUAL KE MASYARAKAT (Rp)	HARGA DI PSAR	SE;ISIJ HARGA
1	BERAS MEDIUM	3.000	kg	10.000/kg	12.500	2.5000
2	BERAS PREMIUM	500	liter	12.000	15.000	2.500
3	GULA	720	kg	15.000	18/000	3.000
4	TERIGU	1.000	kg	8.000	8.000	0
5	BAWANG MERAH	200	bungkus	10.000	11.000	1.000
6	BAWANG PUTIH	200	PERBUNGKUS	10.000	11.000	1.000
7	CABE MERAH	200	Bungkus	5.999	5.000	0
8	CABE RAWIT	200	Perbungkus	5.000	5.000	0
9	TELUR	180	Perbungkus	25.000	35.000	0
9	MINYAK GORENG	640	Liter	15.000	17.000	2.000

- o Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu pada tanggal 18 Maret 2025, melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah di Pekon Waringinsari Baarat Kecamatan sukoharjo yang di hadiri oleh Wakil Bupati Pringsewu ibu Umi Laila dan OPD terekait, adapun komoditas dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah bersubsidi yaitu Beras Medium, Beras Premium, Gula Pasir, Tepung terigu, Minyak goreng, TELur Ayam, Cabe Merah, Cabe rawit, Bawang Merah dan Bawang Putih,

#### PANGAN MURAH

#### DI PEKON WARINGINSARI BARAT DAN PEKON PAGELARAN

Tanggal 18 CZM 20 MARET 2025

NO	KOMODITAS	KUANTUM (KG/LITER/ BGKS) SAT		HARGA JUAL KE MASYARAKAT DI PSAR		SE;ISIJ HARGA
		pekon pagelaran		(Rp)		
1	BERAS MEDIUM	3.000	kg	10.000/kg	12.500	2.5000
2	BERAS PREMIUM	500	liter	12.000	15.000	2.500
4) 3	GULA	720	kg	15.000	18/.000	3.000
4	TERIGU	1.000	kg	8.000	8.000	0
5	BAWANG MERAH	200	bungkus	10.000	11.000	1.000
6	BAWANG PUTIH	200	PERBUNGKUS	10.000	11.000	1.000
7	CABE MERAH	200	bungkus	5.999	5.000	0
8	CABE RAWIT	200	Perbungkus	5.000	5.000	0
9	TELUR	180	Perbungkus	25.000	35.000	0
9	MINYAK GORENG	649	Liter	15.000	17.000	2.000

9). Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan pada tanggal 25 Maret 2025 melaksanakan monitoring ketersediaan pasokan pangan dan harga di pasar Gadingrejo di pimpin oleh Bapak Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas bersama Forkopinda, adanya peningkatan harga pada komoditas Cabe Rawit Merah, Cabe rawit hijau dan Bawang Merah

10(. Pada Tanggal 25 maret 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu melaksanakan Gerakan Pangan Murah di Pekon Gadingrejo yang di hadiri oleh Bapak Bupati Pringsewu Riyanto Pamingkas dan Forkopinda

#### GERAKAN PANGAN MURAH

#### DI PEKON GADINGREJO UTARA KECAMATAN GADINGREJO

PADA TANGGAL 25 MARET 2025

NO	KOMODITAS	PEKON GADINGREJO SAT		HARGA JUAL KE MASYARAKAT DI PSAR		SE;ISIJ HARGA
		UTARA		(Rp)		

1	BERAS MEDIUM	3.000	Kg	10.000/kg	12.000	2.500
2	BERAS PREMIUM	500	liter	12.000	15.000	1.500
3	GULA	720	kg	15.000	18.000	3.000
4	TERIGU	350	kg	10.000	12.000	2.000
5	BAWANG MERAH	200	bungkus	10.000	12.000	2.000
6	BAWANG PUTIH	200	PERBUNGKUS	10.000	12.000	2.000
7	CABE MERAH	200	bungkus	5.999	3.500	1.500
8	CABE RAWIT	200	Perbungkus	5.000	3.500	1.500
9	TELUR	180	Perbungkus	25.000	28.000	3.000
9	MINYAK GORENG	720	Liter	15.000	17.000	2.000

### Sumber data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu

#### KETERSEDIAAN PASOKAN

1. Pada tanggal 23 Januari 2025 Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pringsewu melakukan kegiatan monitoring ketersediaan pasokan cabe merah di Pekon Enggalrejo Kecamatan Adiluwih dengan luas lahan 4 Ha dengan perkiraan hasil produksi

2. Dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Pringsewu, sektor pertanian terus diperkuat sebagai salah satu langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu wujud nyata dari upaya ini adalah melalui kegiatan Panen Raya Cabai Merah yang dilaksanakan di Pekon Enggalrejo, Kecamatan Adiluwih, dan dihadiri langsung oleh Bupati Pringsewu, H. Riyanto Pamungkas. Kegiatan panen raya ini dilakukan di lahan seluas 4 hektar, yang merupakan bagian dari program pengembangan hortikultura yang didanai melalui Dana Insentif Kinerja Daerah Tahun 2024, dalam rangka mendukung pengendalian inflasi. Kelompok Tani Sumber Sari Utama yang menjadi pelaksana kegiatan diperkirakan akan menghasilkan 60 ton cabai merah dari lahan tersebut. Secara keseluruhan, luas tanam cabai merah di Kecamatan Adiluwih mencapai 100 hektar, dengan potensi produksi yang diperkirakan mampu mencapai 1.500 ton. Hasil ini menunjukkan peran penting sektor pertanian dalam menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

3. Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu terus berkomitmen dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Salah satu upayanya diwujudkan melalui kegiatan Panen Raya Padi yang diselenggarakan di Pekon Fajar Agung, Kecamatan Pringsewu, dan dihadiri langsung oleh Bupati Pringsewu, H. Riyanto Pamungkas. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian target swasembada pangan di daerah. Panen raya dilakukan di lahan seluas 51,95 hektar, dengan total luas hamparan sawah di lokasi panen yang mencakup Pekon Fajar Agung dan Kelurahan Fajar Esuk mencapai 111 hektar. Jenis varietas padi yang ditanam mayoritas adalah Inpari 32, dengan rata-rata produktivitas mencapai 5,7 ton gabah kering panen per hektar. Hasil ini menunjukkan potensi pertanian yang sangat baik untuk terus dikembangkan guna mendukung ketahanan pangan daerah.



sekaligus meningkatkan pendapatan para petani.

4. Kegiatan tanam jagung bersama Polres Pringsewu. Dalam upaya mendukung ketahanan pangan komoditas jagung, Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu melakukan penanaman jagung bersama Polres Pringsewu di lahan jagung yang berada di Kantor Polres Pringsewu seluas 3 Hektar. Selain itu dilakukan juga simbolis penyerahan bantuan bibit sayuran oleh Polres Pringsewu sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok wanita tani untuk memanfaatkan lahan pekarangan agar produktif menghasilkan produk-produk pertanian yang layak dikonsumsi serta dijual kepasar.

- **KELANCARAN DISTRIBUSI**

1. Pengawasan keamanan pangan (PSAT)
2. Pembangunan atau pemeliharaan jalan usaha tani (JUT)
3. Tim Satuan Tugas monitoring pengendalian pengawasan pendistribusian bahan bakar liquefied petroleum gas berenergi di Kabupaten Pringsewu melaksanakan monitoring ketersediaan dan distribusi LPg bersubsidi pada agen dan pangkalan guna memastikan ketersediaan LPG bersubsidi.

- **KOMUNIKASI EFEKTIF**

Pemerintah Kabupaten Pringsewu, dalam rangka pengendalian inflasi daerah, melalui TPID Kabupaten Pringsewu terus memperkuat koordinasi baik antar TPID, maupun stakeholder terkait, diantaranya Pengelolaan Kios Pangan, LPG bersubsidi; BULOG, terkait Penyaluran CPP, evaluasi penyaluran bantuan pangan pemerintah dan distribusi komoditas pangan.

Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya:

1. Secara aktif dan rutin mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan oleh Kemendagri
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu Bersama Tim Bulog Provinsi Lampung terkait MOU Perjanjian Kerjasama Penyaluran Bantuan Pangan (Beras) pada tanggal 17 Februari 2025
3. Rapat Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan dalam rangka monitoring ketersediaan pasokan dan harga barang strategis yang dilaksanakan pada tanggal Februari 2025

Dokumentasi

4. Pemantauan Perkembangan harian Harga Komoditas pangan, yang selanjutnya diinput pada Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, Setiap hari Kerja
5. Diskoperindag juga memiliki Aplikasi SIMBAPOK, sebagai sarana Pendataan Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Lainnya di Pasar-Pasar Pemd
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu berkoordinasi dengan Pertamina wilayah Lampung terkait partisipasi pasar murah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

## **EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU**

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Pringsewu dan koordinasi dengan TPID Provinsi Lampung pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan di Kabupaten Pringsewu; Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi serta indikasi surplus defisit pangan di masing-masing ;
2. Toko / Kios Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Pringsewu masih perlu untuk ditingkatkan;
3. Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait perlu memastikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak inflasi, disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.
4. Perlu upaya penguatan koordinasi antara TPID Kabupaten Pringsewu dengan TPID daerah lain dalam rangka:
  - penyediaan dan pendistribusian barang komoditas yang produksinya terbatas atau berada di luar Kabupaten Pringsewu.
    1. fasilitasi penjualan produk-produk UMKM untuk membantu pertumbuhan dan penguatan ekonomi daerah.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

## **REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU**

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi melalui:
  - intervensi pasar untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras;
  - penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya.
    1. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian;
    2. Mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerja sama antar daerah;
    3. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa;
    4. Melanjutkan program integrasi pertanian terpadu secara berkesinambungan untuk meningkatkan produksi pangan;
    5. Melakukan upaya antisipasi dampak perubahan iklim dan menghadapi NATARU, memantau dan monitoring serta mempertahankan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, kestabilan harga dan komunikasi yang efektif;

Pengembangan / Pemanfaatan Lahan Pekarangan (Gerakan Menanam) perlu terus

6. digalakan, untuk menumbuhkan kemandirian pangan masyarakat;
7. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam menjaga ketersediaan pasokan;
8. Melaksanakan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah dengan prioritas di daerah-daerah yang terjadi kenaikan harga;
9. Melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan terhadap stok/pasokan bahan pangan di Distributor/Bulog, Pasar Rakyat dan Ritel Modern, terutama yang sering menjadi pemicu inflasi dan diatur Harga Eceran Tertinggi (HET)-nya oleh Pemerintah;
10. Melakukan pengawasan dengan melibatkan unsur TNI dan POLRI atau Satgas Pangan serta Stakeholder terkait untuk memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang dalam rangka spekulasi.